BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Program Pemerintah dalam menggalakkan pertumbuhan perekonomian berbasis kerakyatan akhir-akhir ini semakin insentif dilakukan, salah satunya adalah melalui Departemen Koperasi dengan memberikan bantuan kredit bergulir maupun kredit lunak bagi koperasi–koperasi rakyat di seluruh Indonesia.

Di era semacam inilah Koperasi adalah merupakan suatu lembaga yang bisa dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Koperasi bisa dinyatakan sebagai Lembaga dari, oleh dan untuk anggota. Dari kalimat diatas bisa ditarik satu benang merah bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kerja bermuara ahir pada kepentingan anggota.

Berkembangnya Koperasi Simpan Pinjam di berbagai daerah di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat, baik yang akan menabung maupun meminjam uang di Koperasi. Hal ini terjadi karena sistem bunga yang diterapkan di Koperasi berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan di Bank. Dimana suku bunga Koperasi untuk pinjaman berkurang sesuai dengan pinjaman yang telah dibayarkan, sedangkan suku bunga Bank untuk bunga pinjaman adalah tetap pertahunnya. Sehingga semakin banyaknya persaingan didunia usaha saat ini semakin kompleknya masalah yang ada, sudah sepantasnya Koperasi melakukan pengukuran dan evaluasi kerja.

Maka dengan demikian semakin banyak koperasi berdiri dan menimbulkan banyak persaingan antar koperasi tersebut. Terlebih lagi pada terpuruknya perekonomian di Asia dan Indonesia pada khususnya. Hal ini disebabkan karena koperasi adalah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Ini dibuktikan pada saat Bank Negara maupun swasta banyak yang dilikuidasi dan di Merjer antara Bank satu dengan yang lainnya. Koperasilah yang tetap berdiri kokoh yang seakan tidak ada masalah.

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang di kawasan Asia tenggara, sebagai Negara yang sedang berkembang dalam menuju kepada Negara yang lebih maju, maka Bangsa Indonesia melaksanakan kegiatan pembangunan di segala sektor, baik sektor ekonomi, budaya dan sosial serta politik. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah pembangunan dibidang ekonomi, dengan alasan bahwa ekonomi yang kuat, merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Namun disamping itu juga tidak menutup kemungkinan sektor yang lain, bagaimanapun juga sektor yang lain saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga apa yang di cita-citakan oleh Bangsa Indonesia yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur baik mteriil maupun sepirituil akan segera terwujud dengan baik.

Pembangunan disektor ekonomi, Pemerintah Indonesia menitikberatkan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi ;

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeuargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan lain yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat.

Di dalam pasal 33 tercantum dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Oleh kerena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, maka cabang produksi akan jatuh ketangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang akan ditindasnya. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi jelasnya bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dengan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Sebab itu bentuk yang sesuai dengan inti demokrasi ekonomi dan azas kekeluargaan yang dimaksud pada ayat 1 tersebut adalah koperasi.

Untuk melaksanakan pembangunan Nasional segenap kemampuan, potensi dan modal dalam masyarakat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna membantu, membimbing pertumbuhan dan peningkatan kemampuan yang lebih besar dari masyarakatnya. Diharapkan dapat mandiri dan meningkatkan tarap hidupnya. Pembangunan Koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan Nasional keseluruhan. Koperasi dapat menciptakan usaha rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan, sehingga tercipta demokrasi ekonomi. Untuk itu koperasi sebagai bentuk yang seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya baik permodalan, pengelolaan, dan aktivitasnya maupun Sumber Daya Manusianya, agar benar-benar mampu mempermainkan peran yang sesungguhnya dalam pembangunan tata perekonomian Nasional.

Menurut Negara kebijaksanaan mengembangkan dan membina koperasi diambil oleh Pemerintah dalam rangka menjadikan koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat sehingga menjadikan wadah utama bagi pembinaan kemampuan golongan ekonomi berpendapatan rendah mengurangi kesenjangan sosial dan pemerataan pendapatan guna menjangkau kehidupan koperasi dalam lapisan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perekonomian.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup serta meningkatkan pelayanan maupun pruduknya koperasi dituntut selalu mempunyai ide-ide baru dan perhatian besar terhadap anggota maupun nasabah, dengan demikian

maka akan banyak sekali masyarakat yang akan menabung uangnya pada koperasi tersebut. Semakin banyak uang yang masuk ke koperasi berarti semakin banyak pula profit yang diterima oleh koperasi tersebut.

Apabila profit yang diperoleh dari hasil pemutaran uang tersebut banyak, maka banyak pula Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh anggota setiap tahunnya.

Di dalam pelayanan kepada para nasabah dan penabung, koperasi harus mampu menyediakan uang tunai untuk pembayaran kepada penabung apabila mengambil uangnya. Untuk itu pihak koperasi perlu menyisihkan uang tunai sebagai likuiditas.

Likuiditas adalah kemampuan untuk menyediakan dana dalam jumlah uang yang cukup untuk membiayai semua transaksi.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka judul dari skripsi ini adalah :

"EFEKTIFITAS SISA HASIL USAHA (SHU) TERHADAP PERTUMBUHAN MODAL KERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM AL MUTTAQIN WONODADI BLITAR TAHUN 2001 S/D 2006"

B. Permasalahan

Pada koperasi simpan pinjam Al Muttaqin Wonodadi Blitar diharapkan dapat meningkatkan Sisa Hasil Usaha dalam upaya meningkatkan Modal Kerja. Akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut masih banyak kendala yang dihadapi, yaitu dengan adanya kredit macet dan kurang pro aktif nya para anggota dalam menentukan prosentase Sisa Hasil Usaha.

Permasalah-permasalahan semacam inilah yang akan menghambat meningkatnya modal kerja. Dari pihak koperasi sudah mengupayakan agar supaya peningkatan modal kerja ini bisa sesuai dengan keinginan koperasi. Untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan mengadakan kontroling dan evaluasing yang berkesinambungan, dengan maksud agar supaya tidak ada kredit macet dan ada peran serta dari anggota.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini penting, sebab akan membantu dan memudahkan dalam memecahkan masalah dalam pengajuan kerangka hipotesa, sehingga perumusan masalah harus tegas dan jelas. Perumusan masalah yang dikemukakan berdasarkan masalah yang ada tersebut adalah, bagaimana pertumbuhan modal kerja koperasi dan mengetahui afektivitas Sisa Hasil Usaha terhadap pertumbuhan modal kerja.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a). Untuk mengetahui pertumbuhan modal kerja koperasi.

b). Untuk mengetahui efektivitas Sisa Hasil Usaha terhadap pertumbuhan modal kerja Koperasi Simpan Pinjam Al Muttaqin Wonodadi Blitar Tahun 2001 s/d 2006

Kegunaan Penelitian

1. Bagi Koperasi

   a). Bagi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam AL Muttaqin Wonodadi Blitar digunakan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengelolaan Koperasi dan pengambilan keputusan yang akan datang yang erat hubungannya dengan Modal Kerja.

   b). Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam AL Muttaqin Wonodadi Blitar digunakan sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan pengurus Koperasi dalam menjalankan usahanya.

2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara Blitar

   Dari hasil penelitian ini bisa menambah perbendaharaan kepustakaan dan bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk permasalahan yang sejenis.

3. Bagi Peneliti

   a). Agar dapat menerapkan secara praktis teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah berhubungan masalah yang diteliti.

   b). Agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan diri lebih lanjut